



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2019

2018

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 180 / MoU-29/HK/2018
NOMOR : 170/SKB-44/XI/2018**

Tanggal : 19 November 2018

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Jabatan : Plt. Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.
2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

c. Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan
Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas
Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

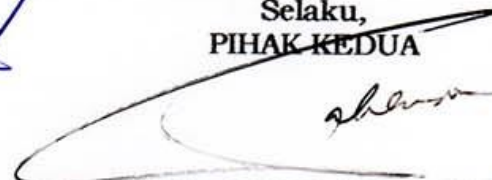
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

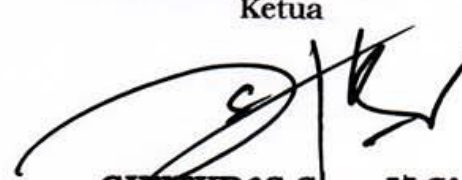
Tenggarong, 19 November 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

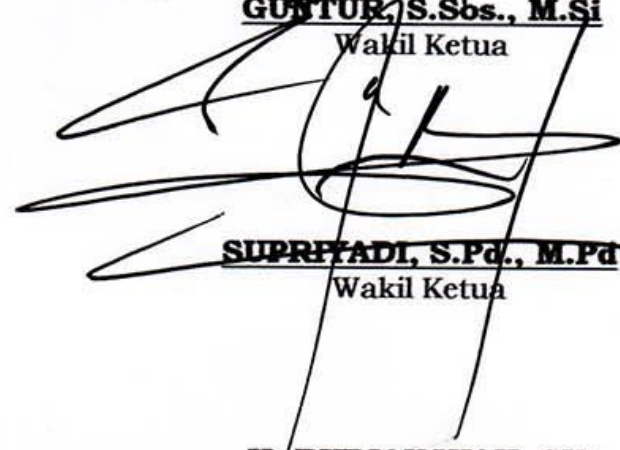

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Selaku,
PIHAK KEDUA


SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Ketua


GUTTUR, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua


SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua


H. RUDIANSYAH, SH
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dimana RKPD merupakan pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya, mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang telah disusun berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, yakni sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan atas dokumen perencanaan tersebut maka selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), yang dibahas dan disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA pada hakikatnya merupakan *bridging* (jembatan) bagi DPRD dalam mengakomodasi RKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini terkait dengan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda terkait proses penyusunan APBD.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rancangan KUA Tahun Anggaran 2019, dengan mengoptimalkan potensi keuangan daerah dengan tetap berpegang pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021 dan Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memperhatikan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang diterjemahkan dalam kebijakan umum penganggaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam kaitannya dengan konsekuensi penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan asumsi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan pembiayaan.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2019 adalah:

- a) Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- b) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 ;
- c) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019;
- d) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
- e) Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2019.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan *trend* laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir secara umum mengalami kontraksi, namun demikian untuk melihat perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: *Dengan Migas; Tanpa Migas; dan Tanpa Migas dan Batu Bara*. Adapun gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ***Pertumbuhan ekonomi dengan migas***, penurunan nilai tambah bruto pertambangan dan penggalan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah, yang disebabkan tingginya dominasi kontribusi pertambangan dan penggalan pada PDRB yakni mencapai 65.72% dan khusus migas sebesar 30,56% (2017). Kinerja pertambangan dan penggalan selain dipengaruhi oleh kapasitas produksi, juga dipengaruhi oleh harga komoditas pasar global dan permintaan pasar, dalam tiga tahun terakhir kapasitas produksi migas Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun, sehingga laju pertumbuhan produksi pertambangan minyak dan gas bumi dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) selalu tumbuh negatif, yakni berturut-turut -1,97%, -1,16% dan -3,88%. Kondisi ini secara agregat berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara, pada tahun 2017, yakni sebesar 1,12%, namun lebih baik dibanding tahun 2016 yang mengalami kontraksi sebesar -1,81%, dan tahun 2015 sebesar -7,19%.
- ***Pertumbuhan ekonomi tanpa migas***, perhitungan PDRB ini dilakukan dengan mengeluarkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sub kategori pertambangan minyak dan gas bumi sedangkan subkategori pertambangan dan penggalan lainnya tetap menjadi bagian dari perhitungan PDRB, pendekatan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan produksi komoditas migas dalam sistem perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pendekatan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami kontraksi yang cukup tinggi, pada tahun 2015 sebesar -10,72%, dan terus berlanjut ke tahun 2016 dengan pertumbuhan -2,28%, dan menunjukkan trend membaik tahun 2017 yakni tumbuh sebesar 4,17%. Kondisi ini disebabkan karena Pertambangan Batubara mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% dan memiliki kontribusi sebesar 32,44%.
- ***Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara***, pendekatan perhitungan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan dua subkategori yang termasuk dalam *unrenewable resources* (sektor tak terbarukan), yakni migas dan batu bara, perhitungan ini diasumsikan lebih mendekati pada kondisi riil gambaran kinerja perekonomian daerah, khususnya terkait dengan pencapaian proses transformasi ekonomi daerah dari dominasi komoditas tak terbarukan menuju optimalisasi komoditas terbarukan. Pada perhitungan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa bergerak positif, namun trend tiga tahun terakhir cenderung melambat, yang terlihat pada tahun 2016

sebesar 2,22%, tahun 2015 tumbuh sebesar 4,47%, tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,79%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara kembali positif yakni sebesar 4,36%.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017

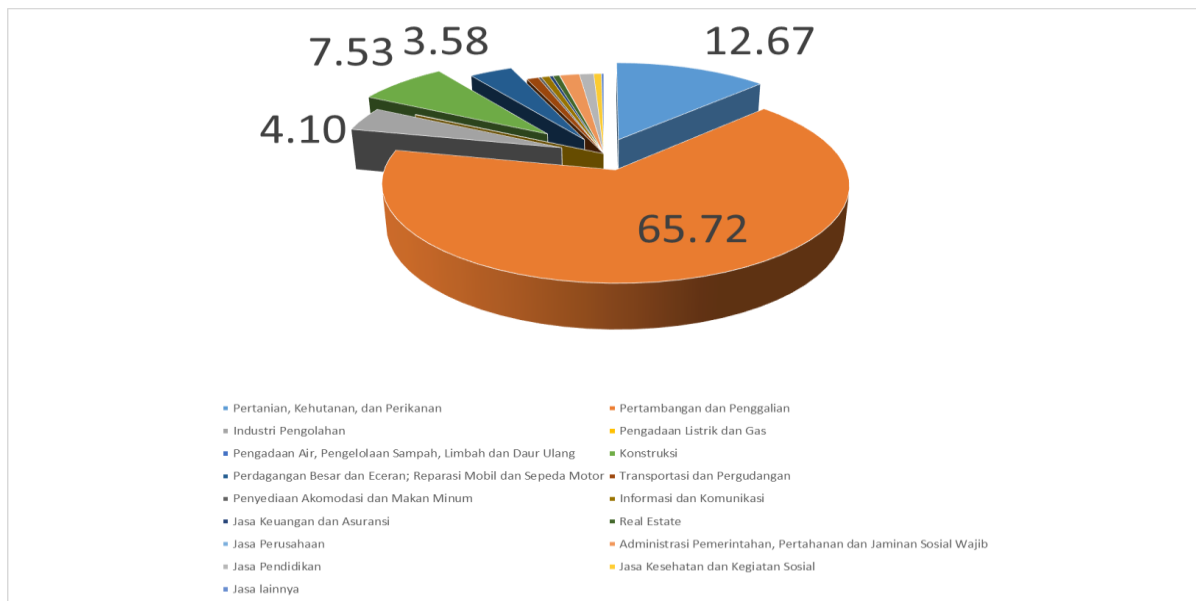
LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017**
1. Pertanian	9.42	4.67	6.79	3.05	4.24
2. Pertambangan dan Penggalian	-1.67	-3.27	-10.66	-3.25	-0.10
2.1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi	-6.72	-8.27	-1.97	-1.16	-3.88
2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit	3.69	1.44	-19.08	-5.72	4.01
2.3. Pertambangan Bijih Logam	0.76	-5.84	-8.94	-8.94	-2.50
2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.30	2.03	1.36	0.30	3.16
3. Industri Pengolahan	6.23	5.45	4.92	8.59	4.19
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	3.38	21.22	28.23	9.63	13.58
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.02	6.28	5.81	7.64	8.45
6. Konstruksi	4.70	14.12	-0.03	-5.46	3.94
7. Perdagangan	4.91	2.19	2.29	4.66	5.80
8. Transportasi dan Pergudangan	7.63	6.65	4.43	6.50	5.68
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.87	6.85	5.99	9.53	10.80
10. Informasi dan Komunikasi	11.04	11.76	10.86	9.03	9.95
11. Jasa Keuangan	16.52	3.40	5.17	4.11	2.69
12. Real Estate	5.69	7.40	4.31	-1.30	1.17
13. Jasa Perusahaan	4.22	6.50	-1.77	-5.83	3.04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	5.08	8.90	13.87	-0.48	-1.54
15. Jasa Pendidikan	14.81	11.91	6.76	11.89	8.50
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6.06	9.59	8.39	11.18	8.81
17. Jasa Lainnya	4.54	9.19	9.12	12.70	9.88
PDRB	0.04	-1.08	-7.19	-1.81	1.12
PDRB Tanpa Migas	4.79	3.42	-10.08	-2.20	4.17
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	6.72	6.79	4.47	2.22	4.36

** . Data Sangat Sementara, Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2018)

2.1.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan kecenderungan karakteristik perekonomian suatu daerah. Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 65,67%, disusul oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,67%, konstruksi sebesar 7,53%, industri pengolahan sebesar 4,10% dan perdagangan sebesar 3,58%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor primer (pertambangan dan penggalian, dan pertanian, kehutanan dan perikanan) merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dan menjadi penopang perekonomian daerah, namun demikian sektor primer terbagi atas sektor yang bersifat terbarukan dan tak terbarukan, mengingat kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yang dipahami sebagai sektor yang tak terbarukan, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus dapat menjadi leading sector perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang. Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016, sebagaimana gambar berikut :

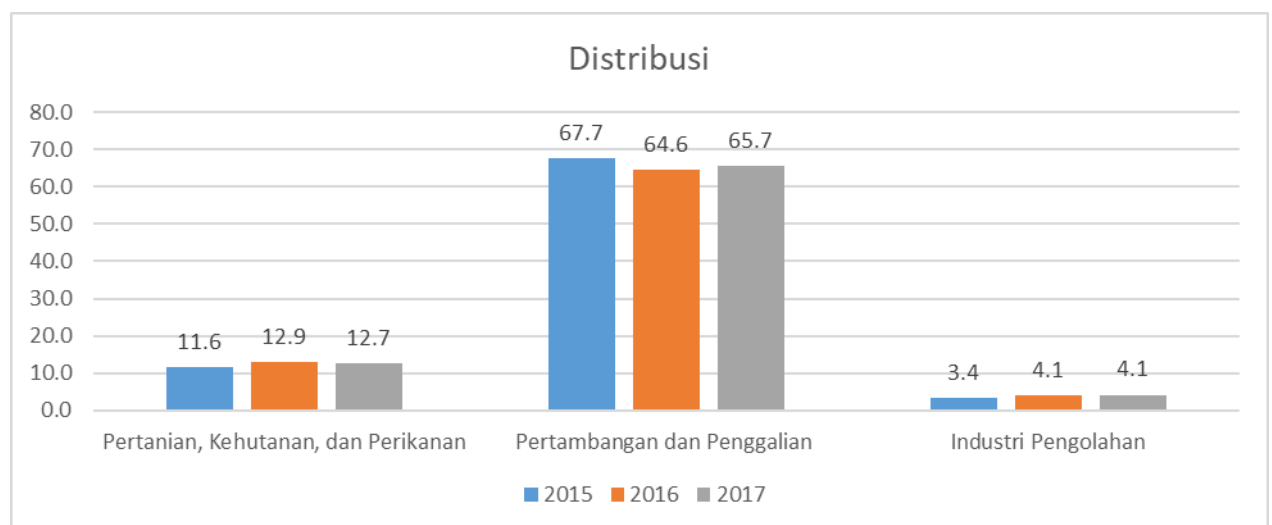
Gambar 2.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PDRB atas harga berlaku tahun 2017*



Sumber : BPS 2017

Pergerakan kontribusi nilai tambah bruto, pada dasarnya dipengaruhi oleh kuatnya dominasi pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan meningkatnya produksi pertambangan dan penggalian pada tahun 2017, maka memberikan pengaruh besar pada sektor-sektor lainnya, pada tahun 2017 pertambangan dan penggalian cenderung terus mengalami kontraksi, namun dalam perspektif kinerja sektoral pertanian dan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berikut perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi untuk tiga sektor kunci perekonomian Kutai Kartanegara tahun 2017.

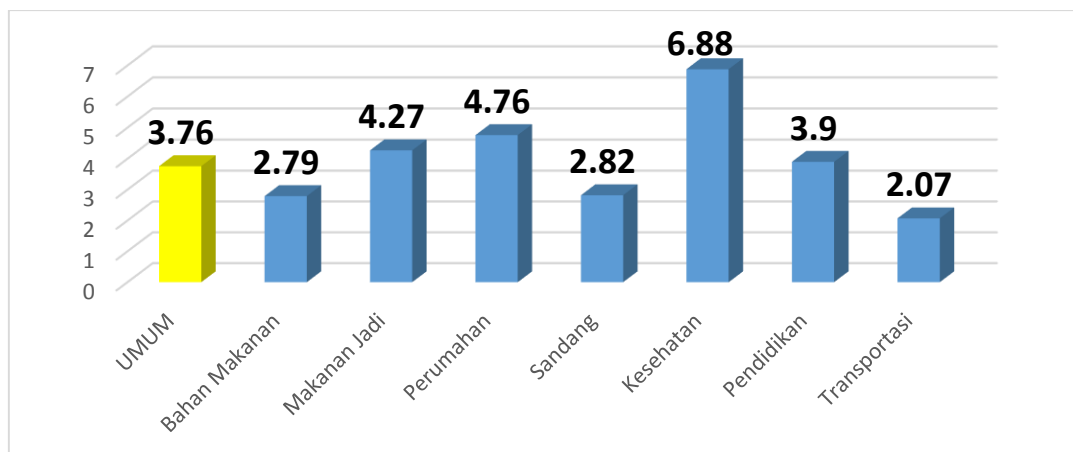
Tabel 2.2 Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan.



2.1.3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas: Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30% setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi (>100% setahun). Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2017, terbesar pada kelompok kesehatan, diikuti oleh perumahan, dan makanan jadi, yang keseluruhannya berada diatas rata-rata inflasi daerah sebesar 3,76%.

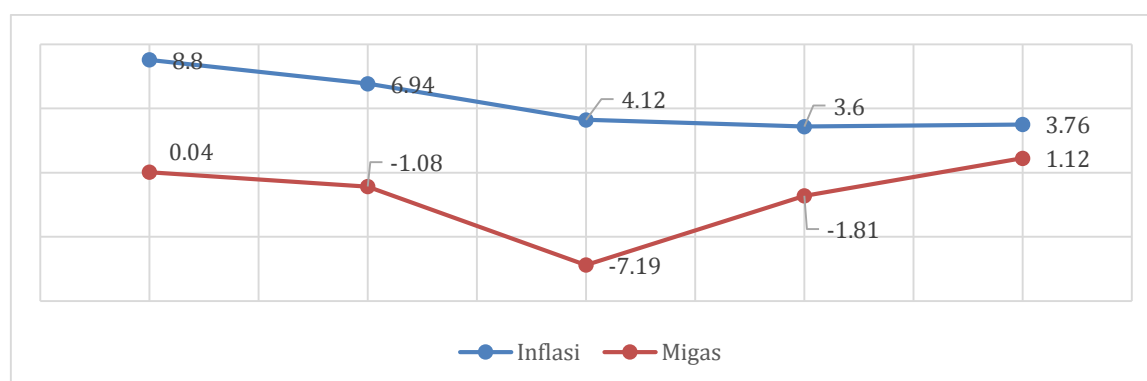
Gambar 2.3. Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran, 2017



Sumber : BPS (2016)

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 3 (tiga) tahun terakhir terkendali dibawah satu digit, dengan kecenderungan mengalami stagnan, pada tahun 2015 sebesar 4,12%, tahun 2016 sebesar 3,60%, dan tahun 2017 sebesar 3,76%. Berikut gambaran trend inflasi Kutai Kartanegara 2013-2017, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan migas, yang mengindikasikan bahwa tingkat inflasi diatas laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Gambar 2.4. Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2019.

Berdasarkan atas perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun sebelumnya, maka target ekonomi makro Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, diarahkan pada pencapaian tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dengan terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019 serta memperhatikan target dan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana tertuang di dalam RKP Nasional dan kebijakan pembangunan ekonomi regional sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,4-5,8% dengan migas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,08 dengan migas. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut berdasarkan atas skema optimis dengan asumsi terdapat perbaikan perekonomian nasional dan global sehingga diyakini memberikan efek positif terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini masih didominasi oleh komoditi pertambangan dan penggalan.

Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data tahun 2017 sebesar 7,57 %, lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2016 yakni sebesar 7,63%. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh melemahnya kinerja perekonomian daerah yang disebabkan kondisi ekonomi global dan nasional, namun demikian dengan segenap strategi penanggulangan kemiskinan daerah, maka target tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar 7,38% lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 6,22%.

Tabel 2.3. Target Indikator Sasaran Makro Kutai Kartanegara 2019

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2019		
			Nasional (RKP)	Prov. Kaltim (RKPD)	Kutai Kartanegara
1	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>				
a	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4 % - 5,8 %		1.08
b	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas	Persen	-		3,85
c	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas dan Batubara	Persen	-		4.00
2	<i>Pengangguran</i>	Persen	4.8 – 5.2%		8,52
3	<i>Angka Kemiskinan</i>	Persen	8,5 -9,5 %		7,38
4	<i>Gini Ratio</i>	Indeks	0,38-0,39		0.28
5	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	Indeks	71,98		74.64
6	<i>Inflasi</i>	Persen	2,5-4,5		3.5

Berdasarkan atas pemutahiran data perekonomian daerah tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017, maka perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 diasumsikan akan bergerak positif, baik migas maupun non migas, hal ini berdasarkan optimistis perbaikan perekonomian nasional yang secara umum akan memberikan dampak bagi perekonomian Kutai Kartanegara, terutama terhadap eksistensi komoditas ekspor Kutai Kartanegara di pasar dunia. Di lain sisi penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan sektor jasa lainnya, diperkirakan akan bergerak positif seiring dengan kebijakan pengembangan pertanian dan pariwisata. Atas dasar tersebut dengan skenario optimistik perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Target Kinerja Perekonomian Kutai Kartanegara 2019

NO	INDIKATOR EKONOMI	2019		
		KUKAR	KALTIM	NASIONAL
1	PDRB Harga Berlaku			
	<i>Dengan Migas</i>	176,419,331.88		-
	<i>Tanpa Migas</i>	112,113,963.00		-
	<i>Tanpa Migas dan Batu Bara</i>	65,290,052.40		
2	PDRB Harga Konstan			
	<i>Dengan Migas</i>	121,132,748.88		-
	<i>Tanpa Migas</i>	84,365,705.35		-
	<i>Tanpa Migas dan Batu Bara</i>	41,708,253.40		-
3	Pertumbuhan Ekonomi			
	<i>Dengan Migas</i>	1.08	2,5±1	5,4-5,8
	<i>Tanpa Migas</i>	3.85	-	-
	<i>Tanpa Migas dan Batu Bara</i>	4.00	-	-
4	Laju Inflasi	3.5	4±1	2,5 – 4,5
5	ICP (USD/Barrel)	-	-	-
6	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar	-	-	13.500 -13.700
7	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	-	-	58 - 65
8	Lifting Gas (BOE per hari)	-	-	-

Sumber Data : Nota RAPBN, RKPD Prov Kaltim, RKPD Kab Kukar 2018

**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)****3.1 Asumsi dasar yang digunakan RAPBN 2018.**

Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RPJMN 2015-2019) adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Atas dasar tersebut perencanaan pembangunan tahun 2019 yang disusun oleh daerah harus mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan yakni :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antar kelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banggar dengan Pemerintah terkait antara lain asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 (RAPBN 2019). Kesepakatan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas.

Kondisi perekonomian nasional tahun 2019 secara umum dapat dilihat dari asumsi perekonomian nasional pada R-APBN tahun 2018, yakni antara lain adalah:

- Nilai tukar rupiah Rp Rp13.700 sampai Rp14.000 per USD
- Suku Bunga SPN 3 bulan dipatok 4,6%-5,2%
- Harga minyak Indonesia (ICP) US\$ 70 per barel
- Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 1.210 – 1.300 ribu barel per hari
- Laju Inflasi 2,5 – 4,5 %

Pendapatan negara dipasang pada rentang 12,7-13,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja dipatok di rentang 14,2-15,4 persen terhadap PDB. Dengan

demikian, pemerintah di tahun 2019 masih akan menganut postur fiskal ekspansif, dengan defisit APBN di rentang 1,6-1,9 persen dari PDB.

3.2 Laju Inflasi Kutai Kartanegara

Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan analisis kecenderungan 3 (tiga) tahun terakhir dikisaran 3 s.d. 6 %, faktor yang paling berpengaruh terhadap inflasi Kutai Kartanegara adalah biaya distribusi dan proses produksi yang terkait dengan harga bahan bakar minyak dan keterisolasian wilayah. Dengan demikian seiring dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, maka sistem logistik daerah diperkirakan akan lebih efisien pada tahun 2018, sehingga diyakini pengendalian harga komoditas hingga ke daerah pedalaman akan lebih stabil. Atas dasar tersebut Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 diproyeksikan pada angka $3,5 \pm 1$ %.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503,69 triliun. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara.

Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Seiring membaiknya harga minerba di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 507,07 triliun dan Rp 592,50 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019, diupayakan akan terus bergerak positif, berdasarkan proyeksi RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2019, dengan asumsi optimistis, pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar **1,08 %**, tanpa migas sebesar **3,85%** dan tanpa migas dan batubara sebesar **4,00 %**.

Asumsi optimis tersebut ditetapkan atas dasar optimalisasi penguatan sektor terbaru (pertanian dan pariwisata), asumsi perbaikan perekonomian nasional, dan penguatan sektor riil dan kerjasama investasi.

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**4.1. Pendapatan Daerah****4.2.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2019;****A. Pendapatan Asli Daerah****1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah**

- a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya
- b) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, akan dilakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- c) Berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pungutan pajak/retribusi pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d) Target pendapatan pajak Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar **Rp.56,052,496,526.00** atau sama dengan tahun 2018. Sedangkan Retribusi diproyeksikan sebesar **Rp. 12,189,718,272.00**

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a) Mendorong Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) untuk menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
- b) Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diupayakan tetap meningkatkan kualitas

maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 diproyeksikan sebesar **Rp.37,050,000,000.00** lebih rendah dari target tahun 2018.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan bunga atau jasa giro, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- b) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar **Rp. 271,738,422,011.00** mengalami kenaikan sebesar **21.42%**.

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas kecenderungan realisasi pada 2 (dua) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.
- b) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya memperhatikan kebijakan nasional tentang alokasi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dengan tetap mempertimbangkan kecenderungan realisasi 2 (dua) tahun terakhir. Adapun Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2019 diproyeksikan sebesar **Rp. 3,185,887,819,230.00** atau **meningkat** dibanding target APBD 2018, dengan jumlah sebesar **Rp. 2,319,759,001,560.00**
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah Propinsi dipengaruhi oleh jumlah

keseluruhan DAU untuk daerah Propinsi, bobot daerah Propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah Propinsi. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara 2019 diproyeksikan sebesar **Rp. 307,135,946,000.- atau meningkat sebesar 23,07 %** dibanding dengan alokasi DAU tahun 2018.

- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sementara tidak dialokasikan sementara menunggu ketetapan pemerintah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 273,172,639,000.00** atau meningkat sebesar 1,34 % dibanding target tahun 2018, dengan asumsi Bantuan Keuangan dari Provinsi belum dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp. 3,600,000,000,-**
- b) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi diproyeksikan sebesar **Rp. 269,572,639,000.00** atau sama dengan tahun 2018. Alokasi Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi ini berdasarkan estimasi, mengingat ketetapan alokasi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara belum diterima secara resmi dari Provinsi Kalimantan Timur ;
- c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, akan disesuaikan lebih lanjut dengan alokasi APBN untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Besaran pendapatan merupakan gambaran efektifitas dari optimalisasi potensi daerah yang dimiliki. Analisis pendapatan merupakan kekuatan dasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik, secara umum pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dibanding target tahun 2018. Berikut Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2018.

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	%
1	PENDAPATAN	3,168,807,488,457.10	4,143,227,041,039.00	30.75%
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	329,912,910,897.10	377,030,636,809.00	14.28%
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	56,052,496,526.00	56,052,496,526.00	0%
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12,503,657,636.42	12,189,718,272.00	-2.51%
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,550,000,000.00	37,050,000,000.00	-1.33%
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223,806,756,734.68	271,738,422,011.00	21.42%
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	2,569,321,938,560.00	3,493,023,765,230.00	35.95%
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,319,759,001,560.00	3,185,887,819,230.00	37.34%
1 . 2 . 2	Bagi Hasil Pajak	1,033,754,504,300.00		
1 . 2 . 3	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1,286,004,497,260.00		
1 . 2 . 4	Dana Alokasi Umum	249,562,937,000.00	307,135,946,000.00	23.07%
1 . 2 . 5	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	269,572,639,000.00	273,172,639,000.00	1.34%
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah		3,600,000,000.00	
1 . 3 . 2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	269,572,639,000.00	269,572,639,000.00	0 %
1 . 3 . 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	
1 . 3 . 4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	

4.2.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Secara umum untuk mencapai target pendapatan asli daerah dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya adalah:

- a) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang dapat langsung direalisasikan dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b) Membangun iklim usaha yang kondusif melalui ketersediaan data serta sarana dan prasarana penunjang investasi.
- c) Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Secara spesifik upaya dilakukan antara lain adalah :

- 1) Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 162/SK-BUP/HK/2017 tanggal 8 Mei 2017, yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan PAD, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah, antara lain: menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak daerah, melakan pengawsan/pemeriksaan, optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari potensi pajak;
 - b. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah, antara lain : menambah penerima wajib retribusi, melakukan pengawasan/pemeriksanaan dan invetarisir dan optimalisasi aset pemerintah kabupaten, optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan potensi retribusi.
 - c. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain : mengintesifikasi penagihan tepat waktu, melakukan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan terkait penerimaan dari perusda dan melakukan kajian penambahan jumlah perusahaan daerah.
 - d. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain : menginventarisasi aset yang memungkinkan untuk dijualbelikan, melakukan penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi bangunan aset daerah, melakukan penambahan jumlah Perusda, melakukan usulan jual beli aset dan pemanfaatan aset daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah.
 - e. Merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait dengan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah khususnya Pelabuhan Samboja. Mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari pengelolaan Pelabuhan Samboja dapat mencapai Rp.600.000.000.000,- per tahun.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan BAPPENAS) terkait dengan upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui Alokasi Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), diantaranya adalah :
 - a. Rapat koordinasi optimalisasi peningkatan DBH dan DAU bersama Kementerian terkait pada bulan Desember 2016 dan Maret 2018;
 - b. *Updating* data-data indikator formulasi pengalokasian DBH, DAU dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kutai Kartanegara, seperti luas wilayah Kutai Kartanegara yang masih menggunakan Permendagri tentang penetapan luas wilayah dimana luas Kutai Kartanegara negara diakui dalam perumusan alokasi DAU hanya sebesar 23 ribu KM² sedangkan berdasarkan Peraturan

Daerah RTRW Kutai Kartanegara, luas wilayah Kutai Kartanegara sebesar 27 ribu KM², dan data-data lainnya terkait dengan Indeks Kemahalan Konstruksi, Jumlah Penduduk, PDRB, Pendapatan Perkapita yang masih perlu di perbaharui.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;

Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian dari stimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan asumsi pendapatan daerah tahun 2019, belanja daerah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, dengan persentase peningkatan sebesar **28,21%**, dengan total belanja sebesar **Rp. 4,203,689,802,365.00**.

Tabel 4.2.
Target Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	URAIAN	APBD 2018	KU-APBD 2019	%
2	BELANJA	3,278,870,250,157.76	4,203,689,802,365.00	28.21%
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,861,130,724,851.97	2,087,733,229,750.00	12.18%
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1,569,772,207,979.73	1,596,031,196,971.00	1.67%
2 . 1 . 2	Belanja Bunga	-	-	0%
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	-	-	0%
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	18,295,550,000.00	26,608,000,000.00	45.43%
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3,138,000,000.00	2,912,000,000.00	-7.20%
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	264,924,966,872.24	457,182,032,779.00	72.57%
2 . 1 . 8	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.0%
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1,417,739,525,305.79	2,115,956,572,615.00	49.25%
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1,417,739,525,305.79	2,115,956,572,615.00	49.25%
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 . 2 . 3	Belanja Modal			

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;

- a. Kebijakan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, dengan tetap memprioritaskan pada belanja gaji PNS, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau dianggarkan sesuai dengan asumsi 2018 dan terdapat penurunan jumlah PNS karena sebagian memasuki purna tugas/pensiun.
- b. Belanja Hibah dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada lembaga-lembaga terkait kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi hibah tahun 2019 sebesar **Rp. 26,608,000,000.00** atau lebih tinggi **45.43%** dibanding tahun 2018 yakni sebesar **Rp. 18,295,550,000.00**. Kenaikan Belanja Hibah disebabkan penambahan alokasi Dana BOSKAB.

Tabel 4.3.

Daftar Penerima Hibah Tahun 2019

No	Penerima	Jumlah (Rp)
I	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	
1	KONI Kabupaten Kutai Kartanegara	4.000.000.000,00
2	Kwarcab Pramuka	
3	Badan Narkotika Kabupaten	
4	Palang Merah Indonesia	
5	LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara	1.600.000.000,00
6	BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara	300.000.000,00
7	MUI Kabupaten Kutai Kartanegara	
II	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	
9	Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura	4.050.000.000,00
III	Belanja Hibah Dana BOSKAB	
10	Dana BOSKAB	16.658.000.000,00
	Jumlah	26.608.000.000,00

- c. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan untuk belanja bantuan sosial kepada veteran dan janda veteran Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp.2.912.000.000,00**. Yang terdiri dari Belanja Santunan Veteran **Rp.1.512.000.000,00** dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar **Rp.1.400.000.000,00**.
- b) Belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik yang bersumber dari APBD dialokasikan sebesar **Rp. 457.182.032.779,00** Terdiri dari Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar **Rp. 1,137,157,600.00** dan Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar **Rp 456,044,875,179.00**

- a. Belanja Tak Terduga, dialokasikan pada tahun 2019 sebesar **Rp. 5,000,000,000.00.**

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

a. Kebijakan pembangunan daerah

Secara umum kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dengan dilakukan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi tentang perangkat daerah.

Tema Pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 adalah ***“Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Transformasi Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Sejahtera”***. Tahap ini memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah;
2. Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat;
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah;
4. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;
5. Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan;
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.

b. Kendala yang dihadapi

Dalam pencapaian target-target pembangunan daerah, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi untuk menjadi penghambat dalam pencapaian target pembangunan daerah, diantaranya adalah :

1. Kondisi perekonomian nasional yang cenderung *unpredictable* , sehingga pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil sangat tergantung dari kondisi perubahan perekonomian nasional;

2. Kecenderungan melemahnya sektor pertambangan dan penggalian, yang berpengaruh pada melemahnya serapan tenaga kerja yang berpotensi untuk menjadi masalah sosial baru.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana pendukung.
4. Koordinasi antar sektor dan antar jenjang pemerintahan, mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki cakupan wilayah pembangunan yang luas.

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang diintegrasikan dengan pembangunan nasional.

Penyusunan strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2019 mempedomani pelaksanaan tahun ke dua RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sehingga strategi dan prioritas pembangunan tidak terlepas dari garis-garis besar yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut strategi dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam proses pembangunan Kutai Kartanegara 2019 :

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kutai Kartanegara dan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara/Sasaran
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Penurunan Kemiskinan
	<i>Percepatan Pengurangan Kemiskinan</i>	<i>Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah</i>
	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat</i>	<i>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</i>
	<i>Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</i>	<i>Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan</i>
		<i>Meningkatnya budaya baca masyarakat</i>
	<i>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak</i>	<i>Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan</i>
	<i>Peningkatan tata Kelola Layanan Dasar</i>	-
2	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	<i>Peningkatan Konektivitas dan TIK</i>	<i>Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan</i>
	<i>Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</i>	-
	<i>Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa</i>	-
	<i>Penanggulangan Bencana</i>	-
	<i>Peningkatan Sistem Logistik</i>	-
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara/Sasaran
	Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	
	<i>Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian</i>	<i>Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah</i>
	<i>Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan</i>	<i>Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing</i>
	<i>Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif</i>	<i>Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara</i>
	<i>Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja</i>	-
	<i>Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas</i>	-
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	-
	<i>Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi</i>	-
	<i>Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</i>	<i>Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah</i>
	<i>Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</i>	-
	<i>Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan</i>	-
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan PEMILU	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Reformasi Birokrasi
	-	<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</i>
	<i>Kamtibmas dan Keamanan Siber</i>	-
	<i>Kesuksesan Pemilihan Umum</i>	-
	<i>Pertahanan Wilayah Nasional</i>	-
	<i>Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah</i>
	<i>Efektivitas Diplomasi</i>	-

Adapaun sasaran prioritas pembangunan Kutai Kartanegara 2019, sebagai berikut:

I. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Penurunan Kemiskinan

1. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan;
2. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
5. Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah.

II. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing;
3. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara;
4. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan.

III. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Reformasi Birokrasi

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah;

Prioritas pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pencapaian prioritas Nasional serta Provinsi Kalimantan Timur, Dalam rangka perwujudan integrasi kebijakan pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional, berikut dukungan prioritas daerah terhadap prioritas nasional dan Kalimantan Timur tahun 2018.

Tabel 4.5.
Dukungan Prioritas Daerah terhadap
Provinsi Kalimantan Timur

No	Prioritas Prov. Kaltim	Prioritas Kutai Kartanegara
1	Penguatan Pendidikan Vokasi & Keterampilan Tenaga Kerja	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Penurunan Kemiskinan
2	Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet	
4	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	
5	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Reformasi Birokrasi

4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja urusan pada prinsipnya adalah tidak terlepas dari pencapaian sasaran prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga belanja urusan merupakan instrumen kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Sebagai wujud pemenuhan amanta Undang-undang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal memenuhi urusan wajib pendidikan dengan proporsi 20%, selanjutnya kesehatan minimal terpenuhi 10% dari belanja daerah.

Berikut belanja perurusan, termasuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Tabel 4.6.
Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Urusan dan SKPD

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	JUMLAH
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.01	Pendidikan			
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	279,505,115,387.00	680,214,775,030.83	959,719,890,417.83
1.02	Kesehatan			
1.02.1	DINAS KESEHATAN	160,802,830,108.00	102,409,280,982.04	263,212,111,090.04
	PUSKESMAS (BLUD)	24,431,274,776.00	-	24,431,274,776.00
1.02.2	RSUD AM. PARIKESIT	28,527,005,100.00	33,496,094,600.57	62,023,099,700.57
	RSUD AM. PARIKESIT (BLUD)	171,000,000,000.00	-	171,000,000,000.00
1.02.3	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	34,770,943,700.00	10,854,141,179.57	45,625,084,879.57
	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (BLUD)	35,194,377,235.00	-	35,194,377,235.00
1.02.4	RSUD DAYAKU RAJA	50,309,930,463.00	3,247,137,223.73	53,557,067,686.73
	RSUD DAYAKU RAJA (BLUD)	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	458,658,119,836.39	32,771,609,874.75	491,429,729,711.14
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.04.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	105,772,179,483.00	20,403,355,534.25	126,175,535,017.25
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1.05.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14,587,841,538.00	15,828,593,070.78	30,416,434,608.78
1.05.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17,394,094,160.00	8,840,651,890.90	26,234,746,050.90
1.05.3	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	2,777,297,491.00	8,439,383,593.76	11,216,681,084.76

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	JUMLAH
1.06	Sosial			
1.06.1	DINAS SOSIAL	10,666,316,825.00	8,901,341,370.16	19,567,658,195.16
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
2.01	Tenaga Kerja			
2.01.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5,098,251,769.00	9,595,914,648.36	14,694,166,417.36
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,163,411,200.00	6,018,725,359.72	10,182,136,559.72
2.03	Pangan			
2.03.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	5,292,887,593.00	6,271,748,621.81	11,564,636,214.81
2.04	Pertanahan			
2.04.1	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	32,995,074,520.00	7,320,674,463.21	40,315,748,983.21
2.05	Lingkungan Hidup			
2.05.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9,776,642,994.00	8,936,514,589.17	18,713,157,583.17
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil			
2.06.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10,956,368,344.00	10,111,768,335.22	21,068,136,679.22
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.07.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,373,515,312.00	13,033,938,220.28	23,407,453,532.28
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,815,810,053.00	10,880,178,171.13	16,695,988,224.13
2.09	Perhubungan			
2.09.1	DINAS PERHUBUNGAN	33,339,122,137.00	12,574,298,309.89	45,913,420,446.89
2.10	Komunikasi dan Informatika			
2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,466,656,408.11	11,298,695,152.47	28,765,351,560.58
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.11.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6,286,543,663.97	8,921,668,617.50	15,208,212,281.47
2.12	Penanaman Modal			
2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,699,759,080.00	9,148,456,210.99	12,848,215,290.99
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			
2.13.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24,365,862,900.00	10,504,624,908.95	34,870,487,808.95
2.18	Kearsipan			
2.18.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,586,343,716.00	9,800,089,886.91	14,386,433,602.91
3	Urusan Pilihan			
3.01	Kelautan dan Perikanan			
3.01.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38,791,150,954.00	16,886,259,086.44	55,677,410,040.44
3.02	Pariwisata			

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	JUMLAH
3.02.1	DINAS PARIWISATA	16,007,219,699.00	14,437,109,901.70	30,444,329,600.70
3.03	Pertanian			
3.03.1	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	49,043,254,686.00	57,295,588,563.47	106,338,843,249.47
3.03.2	DINAS PERKEBUNAN	16,795,060,770.00	20,981,884,561.60	37,776,945,331.60
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral			
3.05.1	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18,328,222,120.00	8,115,604,556.54	26,443,826,676.54
3.07	Perindustrian			
3.07.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16,158,040,243.00	12,671,622,377.02	28,829,662,620.02
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
4.01	Administrasi Pemerintahan			
4.01.1	DPRD	-	28,885,720,642.40	28,885,720,642.40
4.01.2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	781,787,343.30	781,787,343.30
4.01.3	SEKRETARIAT DAERAH	62,199,695,013.00	63,761,680,507.71	125,961,375,520.71
4.01.4	SEKRETARIAT DPRD	58,023,112,975.00	18,143,251,773.51	76,166,364,748.51
4.01.5	SEKRETARIAT DP. KORPRI	1,654,098,971.00	2,678,581,541.93	4,332,680,512.93
4.01.6	KECAMATAN TENGGARONG	55,490,233,078.00	34,991,749,607.50	90,481,982,685.50
4.01.7	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	3,224,447,160.00	7,020,024,280.08	10,244,471,440.08
4.01.8	KECAMATAN LOA KULU	1,616,125,834.00	7,254,787,743.25	8,870,913,577.25
4.01.9	KECAMATAN LOA JANAN	1,464,675,200.00	4,376,178,669.08	5,840,853,869.08
4.01.10	KECAMATAN MUARA BADAK	4,449,842,000.00	3,599,109,248.51	8,048,951,248.51
4.01.11	KECAMATAN MARANG KAYU	3,450,453,000.00	4,331,925,234.83	7,782,378,234.83
4.01.12	KECAMATAN MUARA JAWA	30,326,827,500.00	10,030,807,496.23	40,357,634,996.23
4.01.13	KECAMATAN SAMBOJA	47,551,547,238.00	21,184,853,916.99	68,736,401,154.99
4.01.14	KECAMATAN SEBULU	3,376,877,408.00	4,392,237,399.32	7,769,114,807.32
4.01.15	KECAMATAN MUARA KAMAN	1,744,500,000.00	6,093,918,980.51	7,838,418,980.51
4.01.16	KECAMATAN KOTA BANGUN	2,444,850,412.53	4,896,925,523.10	7,341,775,935.63
4.01.17	KECAMATAN MUARA MUNTAI	2,067,620,920.00	5,586,029,515.49	7,653,650,435.49
4.01.18	KECAMATAN KENOHAN	3,018,563,510.00	2,977,860,347.83	5,996,423,857.83
4.01.19	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	3,462,360,553.00	3,783,321,581.91	7,245,682,134.91
4.01.20	KECAMATAN TABANG	9,916,173,000.00	6,163,460,931.63	16,079,633,931.63
4.01.21	KECAMATAN MUARA WIS	2,183,184,000.00	3,880,508,446.89	6,063,692,446.89
4.01.22	KECAMATAN SANGA-SANGA	8,374,295,745.00	6,833,677,653.39	15,207,973,398.39
4.01.23	KECAMATAN ANGGANA	1,429,998,160.00	4,367,463,806.83	5,797,461,966.83
4.02	Pengawasan			
4.02.1	INSPEKTORAT KABUPATEN	6,535,476,160.00	13,003,591,498.21	19,539,067,658.21
4.03	Perencanaan			
4.03.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	16,245,833,517.00	16,140,591,564.62	32,386,425,081.62
4.04	Keuangan			
4.04.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17,943,308,786.00	27,956,337,029.43	45,899,645,815.43

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	JUMLAH
4.04.2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24,627,959,004.00	71,958,484,414.03	96,586,443,418.03
4.05	Kepegawaian			
4.05.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11,444,366,206.00	11,320,497,243.91	22,764,863,449.91
4.07	Penelitian dan Pengembangan			
4.07.1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,953,623,000.00	9,424,104,134.82	12,377,727,134.82
JUMLAH		2,115,956,572,615.00	1,596,031,196,971.00	3,711,987,769,586.00

4.3. Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018. Sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun 2019 berasal dari SiLPA mencapai **Rp. 64,062,761,326.00,-**.

4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2019 tidak dialokasikan

Tabel 4.5.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019

KODE	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	%
	<i>SURPLUS/DEFISIT</i>	- 110,062,761,700.66	-60,462,761,326.00	-45.07
3	PEMBIAYAAN DAERAH	110,062,761,700.66	64,062,761,326.00	-44.32
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115,062,761,700.66	64,062,761,326.00	-44.32
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	115,062,761,700.66	64,062,761,326.00	-44.32
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000.00	3,600,000,000.00	- 28.00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	3,600,000,000.00	- 28.00
	<i>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	0%

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi bagian dari proses penganggaran Tahun Anggaran 2019.

Tenggarong, 19 November 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.